



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**RAPAT KERJA MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
DENGAN KOMISI IV DPR-RI**

JAKARTA, 23 Maret 2022



## **Agenda Rapat Rapat Kerja :**

- 1. Ketersediaan Stok Ikan Menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional**
- 2. Tindak lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI**
- 3. Program Prioritas Tahun 2023**

# 1 *Ketersediaan Stok Ikan Menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional*



# PROGNOSA KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN IKAN TAHUN 2022

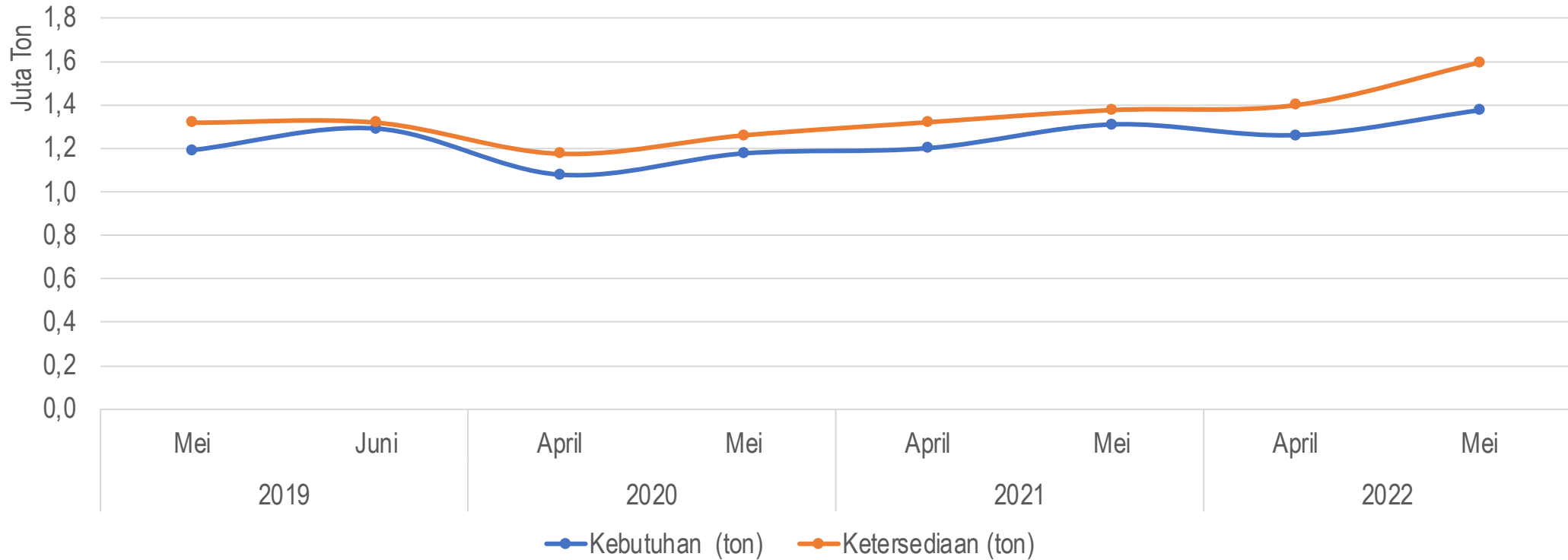
Berdasarkan Prognosa Tahun 2022 :

- Perkiraan kebutuhan ikan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebesar **2,64 juta ton** berdasarkan kebutuhan konsumsi ikan bulan April dan Mei yang diperkirakan **meningkat sebesar 10-20%**
- Prognosa ketersediaan ikan selama bulan April dan Mei sebesar **2,99 juta ton** didasarkan pada **estimasi produksi tangkap dan budidaya dengan memperhatikan pola musim penangkapan dan pola produksi budidaya**
- Prognosa pasokan ikan diperkirakan **cukup** untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Bulan	Kebutuhan (Juta Ton)	Ketersediaan (Juta Ton)	+/- (Juta Ton)
April 2022	1,26	1,40	0,14
Mei 2022	1,38	1,60	0,22
Total	2,64	2,99	0,36



# PROGNOSA KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN IKAN PADA SAAT RAMADHAN DAN IDUL FITRI, TAHUN 2019-2022

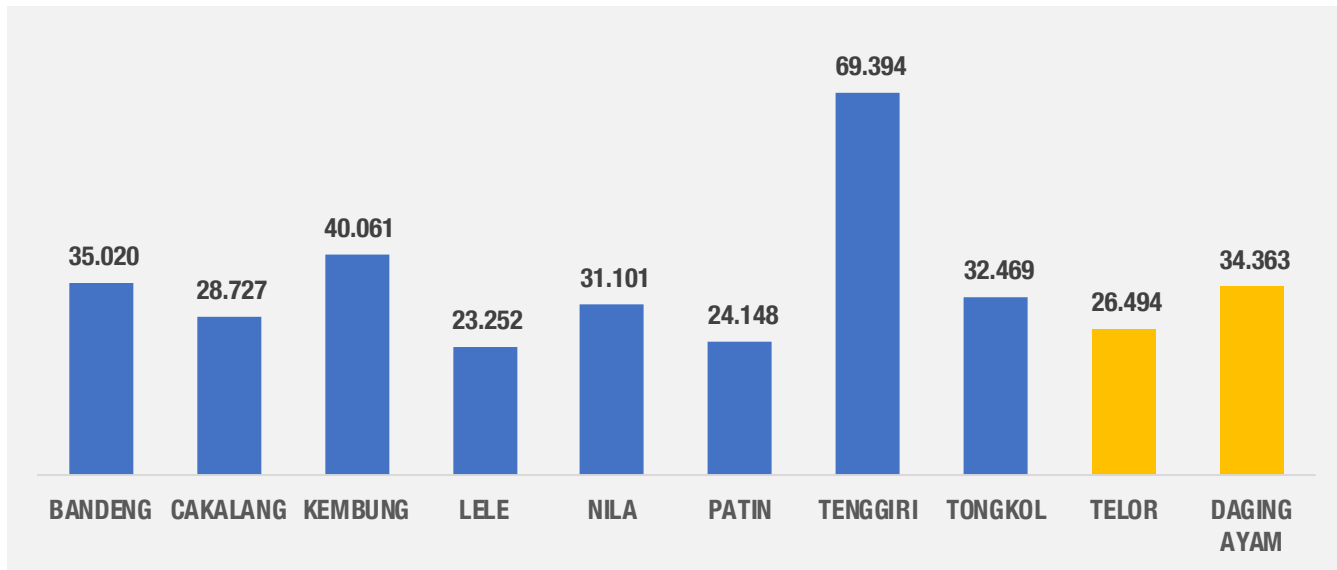


1. Rata-rata kebutuhan ikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri berdasarkan data 4 tahun terakhir (2019-2022) sebesar 1,24 Juta Ton
2. Rata-rata ketersediaan ikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri berdasarkan data 4 tahun terakhir (2019-2022) sebesar 1,35 Juta Ton
3. Kebutuhan Ikan menjelang Idul Fitri selama periode 4 tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 8% apabila dibandingkan dengan kebutuhan ikan di Bulan Ramadhan
4. Ketersediaan Ikan menjelang Idul Fitri selama periode 4 tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 6% apabila dibandingkan dengan ketersediaan ikan di Bulan Ramadhan
5. Pada periode 4 tahun terakhir ketersediaan ikan **cukup** untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri



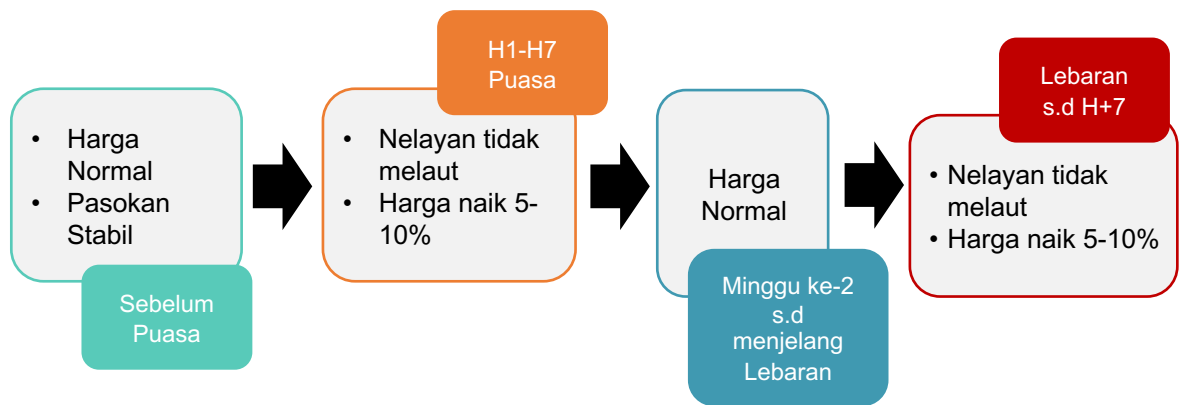
# PERBANDINGAN HARGA RATA-RATA KOMODITAS IKAN PENTING DENGAN TELUR & DAGING AYAM

SURVEY HARGA IKAN 4-21 MARET 2022, DAN HARGA TELUR & DAGING AYAM 21 MARET 2022  
DI 59 PASAR IKAN DI 50 KABUPATEN/KOTA 26 PROVINSI (SATUAN: RP/KG)



## PREDIKSI FLUKTUASI HARGA IKAN MENJELANG, PADA SAAT, SETELAH PUASA DAN LEBARAN

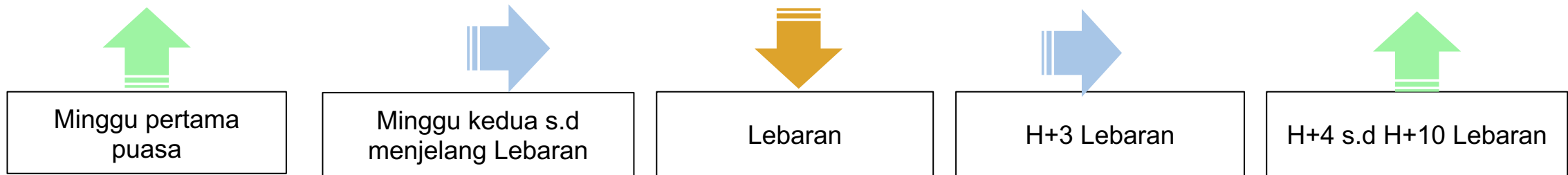
Untuk menjaga pasokan dan harga rata-rata komoditas ikan penting dimasyarakat, khususnya pada H+1 sd H+7 Bulan Ramadhan dan saat Lebaran sd H+7 setelah Lebaran, maka pasokan ikan akan *disupply* dari stok yang ada di Gudang Beku dan produksi Perikanan Budidaya



# PREDIKSI PERMINTAAN IKAN MENJELANG, PADA SAAT, SETELAH PUASA DAN LEBARAN

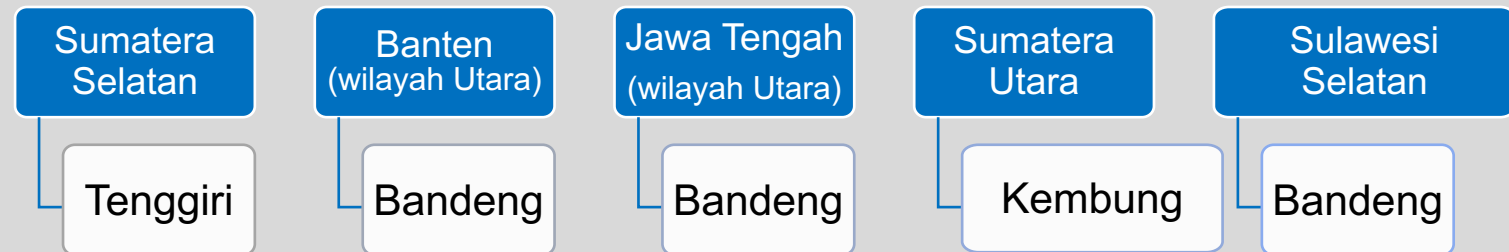


## POLA PERMINTAAN IKAN



Permintaan ikan meningkat di minggu pertama puasa, kemudian stabil di minggu kedua hingga lebaran. Permintaan menurun pada saat lebaran lalu stabil kembali di H+3 lebaran. Kemudian H+7 meningkat untuk keperluan horeka dan oleh-oleh.

### KOMODITAS PERIKANAN YANG PALING DIMINATI SAAT LEBARAN\*



- Di beberapa daerah komoditas perikanan diminati pada saat lebaran, baik sebagai hidangan khas maupun oleh-oleh (bandeng presto di Jawa Tengah, sate bandeng di Banten)
- Ikan olahan (terutama *value added products* dan kaleng) pada saat puasa dan lebaran meningkat cukup tinggi, karena sifatnya yang mudah disimpan dan diolah, serta kebutuhan untuk parcel/bingkisan saat lebaran (kaleng)

# 2

## *Tindak lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI*



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Budidaya Koral, Kerapu, Lobster di Serangan dan Denpasar (15-19 Februari 2021)

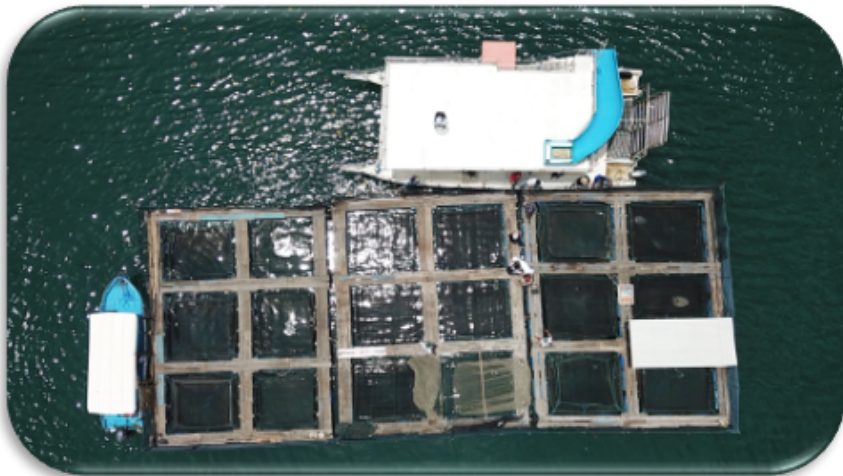


## REKOMENDASI

- Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan usaha budi daya perikanan laut di Desa Serangan dengan melaksanakan teknik tumpang sari ikan kerapu dengan Kerang Abalon dan/atau Lobster.
- Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu mendampingi para pembudi daya ikan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi budi daya agar hasil produksi perikanan meningkat

## TINDAK LANJUT

- Pada tahun 2021, DJPB telah mendistribusikan **bantuan benih ikan laut** sebanyak 8.300 ekor dan **Keramba Jaring Apung (KJA)** sebanyak 3 unit di daerah Denpasar Selatan (kelompok pembudidaya Sari Merta Segara). Penyediaan benih ikan dan KJA dapat dimanfaatkan oleh kelompok pembudidaya ikan dikombinasikan dengan komoditas lain
- **Pendampingan** teknologi dan penyediaan sarpras dilakukan oleh UPT Ditjen PB, yakni BPBAP Situbondo dan BPIU2K Karangasem.
- BRSDMKP bersama PEMPROV Bali telah membahas konsep Bali Fish Estate yang salah satunya adalah aplikasi teknologi budidaya laut menunjang perekonomian Bali. Komoditas ekonomis penting seperti Kerapu, Bandeng, Kakap, Abalon, teripang pasir, telah berhasil dibudidayakan. Untuk kegiatan tumpang sari/Polikultur, BRSDM telah melaksanakan **inovasi riset polikultur Abalon (*Halotis squamata*) dan Kerapu Hibrid Cantang (*Epinephelus fuscoguttatus x E. lanceolatus*)**. Aplikasi dari teknologi tumpangsari/polikultur ini akan disinergikan dengan **penyuluhan**, dimana Denpasar menjadi lokasi percontohan. Kedepan BRSDM siap mendukung pendampingan masyarakat melalui alih teknologi termasuk tumpang sari/polikultur abalon dan kerapu di lokasi yang ditentukan. Selain itu beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan terkait tumpang sari/polikultur ini adalah kegiatan aplikasi “Patih Salibu” atau tumpangsari/polikultur Komoditas Kakap Putih dan Padi salin satu ibu yang dilaksanakan di Tabanan bersama kelompok pembudidaya ikan.
- Pendampingan kepada kelompok pelaku utama pembudidaya ikan di Kelurahan Serangan telah dilaksanakan secara rutinitas oleh penyuluh pendamping. Adapun kelompok pembudidaya yang ada di kelurahan serangan sebanyak 5 kelompok antara lain: Pokdakan Sarimerta Segara, Pokdakan Jaba Segara, Pokdakan Merta Segara Asih, Pokdakan Segara Ayu, Pokdakan Saka Segara Pulomas.





# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Konservasi dan Budidaya Ikan di Danau Singkarak (10-14 April 2021)



## REKOMENDASI

1. KKP dan Pemda Sumbar melakukan pengaturan atas pemberian izin usaha perikanan tangkap dan budidaya bagi pengusaha dan masyarakat di Danau Singkarak dan sekitarnya, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
2. KKP memberikan alternatif usaha budidaya ikan bagi nelayan di Danau Singkarak demi menghentikan penangkapan ikan bilih

## TINDAK LANJUT

- Danau Singkarak termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 439.
- Sesuai dengan PERMEN KP No. 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. WPPNRI PD terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- Pada tahun 2021, KKP memberikan bantuan di lokasi Danau Singkarak berupa **benih ikan air tawar, calon induk, pakan, bioflok, dan restocking ikan endemik** senilai Rp. 1,7 Milyar dan bantuan **permodalan dari BLULPMUKP** senilai Rp. 2,6 Milyar.
- Pada tahun 2022, KKP berencana **melanjutkan kegiatan bantuan pemerintah bidang perikanan budidaya untuk mendukung alih usaha nelayan.**
- **Pengembangan dan pendampingan** teknologi pembenihan dan pembesaran ikan bilih, dilakukan oleh BPBAT Sungai Gelam.



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Konservasi dan Budidaya Ikan di Danau Singkarak (10-14 April 2021)

## TINDAK LANJUT

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta K/L terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dan terus bekerja sama untuk melakukan berbagai upaya menjaga keberlanjutan Danau Singkarak dan lingkungannya, antara lain **pembuatan Reservaat, Pembinaan kepada Kelompok Masyarakat, pemberian bantuan alat tangkap tradisional, patroli pengawasan di Danau Singkarak**
- KKP pada tahun 2023 akan menyusun **Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Ikan Bilih** sebagai upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan di Danau Singkarak yang berisi rencana aksi antara lain :
  1. **Pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya**, melalui pengendalian eceng gondok, mitigasi dan penanganan pencemaran lingkungan, restocking ikan jenis asli, menetapkan kawasan lindung (reservaat) ikan bilih, serta peningkatan kapasitas dan keterlibatan pelaku usaha perikanan bilih dalam upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di Danau Singkarak.
  2. **Pengaturan penangkapan ikan**, mulai dari jenis, ukuran dan selektivitas Alat Penangkapan Ikan (API) yg boleh digunakan, musim penangkapan ikan, dan penempatan API di ruang perairan Danau Singkarak.
  3. **Pembentukan kelembagaan pengelolaan sumber daya ikan bilih** di Danau Singkarak, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait antara lain sektor yang menangani sumber daya air, sektor lingkungan hidup, sektor pertanian, dan sektor pariwisata.
  4. **Peningkatan kesejahteraan nelayan**, melalui diverifikasi usaha perikanan dan alternatif mata pencaharian, guna meminimalisir ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya ikan bilih di Danau Singkarak.



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Pokdakan Ikan Mas Majalaya di Kab. Bandung (8-12 Oktober 2021)



## REKOMENDASI

1. Bimbingan teknis kepada pembudidaya ikan mas majalaya;
2. Revitalisasi unit pembenihan;
3. Bantuan calon induk, bioflok, dan bahan baku pakan;
4. Sertifikasi CBIB, CPIB, dan CPPIB kepada budidaya ikan mas majalaya

## TINDAK LANJUT

1. Pada 2021, KKP memberikan **bantuan benih ikan calon induk, bioflok, dan bantuan sarpras** di Kab. Bandung senilai Rp. 433 juta serta **pelatihan** budidaya ikan mas pada 3-4 November 2021.
2. Pada tahun 2022, KKP berencana melanjutkan bantuan pemerintah seperti **benih ikan air tawar, calon induk kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR), pakan mandiri, bioflok, asuransi, dan restocking ikan endemik**.
3. KKP terus mendorong keberlanjutan ikan endemik, salah satunya ikan Mas Majalaya dengan mendorong pembudidaya **bersertifikat CBIB, CPIB, dan CPPIB**.
4. Pemuliaan genetik ikan mas majalaya dan **bimbingan teknis** kepada pembudidaya terus dilakukan oleh BBP BAT Sukabumi.
5. BRSDMKP melalui Puslatluh siap untuk memberikan bimtek kepada pembudidaya ikan khususnya pembudi daya ikan mas majalaya dengan melaksanakan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), Cara Budidaya yang baik (CBIB), dan Cara karantina Ikan yang baik (CKIB).



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

## Danau Toba di Kab. Karo (10-14 Oktober 2021)



### REKOMENDASI

KKP agar tetap memproduksi benih ikan dalam rangka menjaga ketersediaan ikan di perairan umum dan perairan laut guna kesejahteraan masyarakat Indonesia

### TINDAK LANJUT

1. Pada 2021, KKP **merestocking** 50.000 ikan tawes dan 15.000 ikan nilem, dan ikan bilih di Danau Toba, serta menghimbau agar masyarakat tidak restocking ikan nila karena bersifat invasif dan menghilangkan habitat asli.
2. Dalam Rakor Danau Toba - Kemenkomarinvest, KKP mendukung **kebijakan penertiban jumlah KJA** di Danau Toba dan menjaga KJA yang dapat beroperasi tidak melampaui batas produksi maks. 10.000 ton/tahun atau 3.333 petak KJA.
3. Pada 2022, KKP akan melanjutkan kegiatan **restocking ikan endemik** Danau Toba, serta mendukung kegiatan **alih profesi ke Darat** bagi peserta KJA yang terkena dampak penertiban, melalui **bantuan bioflok**.
4. BRSDMKP merintis pengembangan Bank Genetik Ikan (BGI) Indonesia sebagai upaya pelestarian, peningkatan dan pemanfaatan plasma nutfah perikanan Indonesia secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. BRSDMKP telah mengembangkan;
  - Teknologi pembenihan ikan laut dengan komoditas antara lain: bandeng, crustacea, kerapu, kakap, teripang, moluska, tuna sirip kuning, ikan kobis, napoleon dan kuwe serta ikan hias laut.
  - Teknologi domestikasi ikan-ikan lokal/endemik tawar diantaranya : ikan Tor Soro/Ikan batak yang menjadi icon dari Danau Toba, Ikan Belida dan ikan gariang, Ikan baung, ikan putak dan ikan bilih (endemic Danau Toba dan Singkarak).
  - Pengembangan dan penyediaan induk unggul dan benih unggul melalui kegiatan pemuliaan ikan.

# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI Republik Lele di Kediri (17-21 Desember 2021)



## REKOMENDASI

1. KKP agar memperhatikan Republik Lele dan menjadikannya sebagai best practice/percontohan untuk diterapkan di daerah lain;
2. Pengembangan pakan mandiri dan mempermudah penerbitan sertifikat pakan.

## TINDAK LANJUT

1. Menteri KP telah menetapkan **Kab. Kediri sebagai Kampung Perikanan Budidaya** dengan sentra produksi di Republik Lele melalui Kepmen KP No. 16/2022
2. Melalui program Kampung PB ini, seluruh elemen KKP bersinergi mengembangkan bisnis proses perikanan budidaya dari hulu sampai hilir sehingga meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan pelaku usaha yang terlibat, serta meningkatkan perekonomian daerah
3. Pada tahun 2022, KKP merencanakan **penyediaan sarana produksi, pakan, kesehatan ikan, dan papan informasi** di Kampung Lele Kediri
4. Di Kab. Kediri, KKP merencanakan **bantuan benih, calon induk, bioflok, dan mesin pakan, serta mempermudah sertifikasi CPPIB**



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja-Lampulo dan Integrated Cold Storage (15-19 Februari 2022)

## REKOMENDASI

- Komisi IV DPR RI meminta kepada DJPT KKP untuk mengalokasikan anggaran tambahan di tahun 2021 sebesar Rp50 miliar untuk kegiatan dan program penanganan pendangkalan kolam tambat labuh PPS Kutaraja-Lampulo.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada DJ PDS KKP untuk segera mengoperasikan ICS 200 ton di PPS Kutaraja-lampulo Aceh, sehingga program atau sistem rantai dingin berjalan dan kebermanfaatan pembangunan ICS 200 ton dirasakan oleh pelaku usaha seluruh Aceh dan sekitarnya.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada PDS KKP melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sewa aset ICS 200 ton di PPS Kutaraja-Lampulo, hal ini menjadi sangat penting karena pembangunan ICS 200 ton tersebut dilakukan sejak tahun 2016-2017 yang seharusnya sudah berjalan, sehingga diharapkan tidak menjadi temuan BPK.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen PDS KKP untuk dapat membina, mengembangkan, meningkatkan setiap produk unggulan hasil perikanan serta memberikan akses dalam hal pemasaran, baik di dalam maupun di luar Aceh



## TINDAK LANJUT

- Mengacu UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Lampulo secara administrasi merupakan **UPT Daerah milik Provinsi Aceh**.
- Rencana pengembangan PP Lampulo berupa pengerukan kolam pelabuhan merupakan kegiatan besar dan berdampak, sehingga perlu dilakukan **studi perencanaan yang komprehensif dan memerlukan dokumen pendukung lain berupa izin lingkungan**. Sehingga dibutuhkan waktu yang memadai untuk pelaksanaannya dari mulai studi perencanaan, dokumen izin lingkungan hingga pelaksanaan pengerukan.
- Disarankan kepada Pemda Aceh untuk dapat terlebih dahulu menyiapkan **dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya** sehingga kebutuhan kegiatan fisik (pengerukan) dapat terlaksana secara tepat sasaran.
- **ICS telah operasional dan dikelola oleh Dinas KP Provinsi**. Produksi per bulan sebesar 50-70 Ton. Tujuan pasar : Jakarta, Surabaya, Medan, Ekspor Tiongkok. Jenis Ikan : Cakalang, Layang Biru, Layur, dll. Kontribusi PAD sebesar Rp. 70-80 Juta/Bulan

# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto (Tanggal 10-14 April 2021)

## REKOMENDASI

- Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. KKP bersama-sama dengan Pemprov DIY untuk melaksanakan revitalisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto agar bisa beroperasi dan menjadi salah satu pusat perekonomian terpadu di daerah selatan Pulau Jawa.
- Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. KKP bersama-sama dengan Pemprov DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersinergi untuk menyusun rencana pengelolaan dan pembagian kewenangan dalam rangka revitalisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikerto.

## TINDAK LANJUT

- Rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Kemenko Marves pada Rabu (04-03-2021), Kemenko Marves dan Pemerintah Provinsi DIY sudah sepakat untuk **mengintegrasikan perencanaan pantai selatan dengan penataan kawasan di sekitar**, yakni PP Tanjung Adikerto, kawasan strategis YIA, dan kawasan Pantai Selatan DIY.
- Tindak lanjut Rakor dilakukan kunjungan lapangan (12-03-2021) di PP Tanjung Adikerto oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Gubernur DIY, dan Bupati Kulon Progo.

KONDISI ALUR DAN KOLAM (Maret 2021)



Tindak lanjut kunjungan MKP dan Komisi IV DPRRI telah dilakukan koordinasi dan kunjungan lapang tim teknis identifikasi kebutuhan dan permasalahan PP Tanjung Adikerto sebagai berikut:

1. Kendala utama penyelesaian/ pengoperasionalan PP Tanjung Adikerto yaitu **pendangkalan kolam dan alur kapal, serta tumpang tindih status kepemilikan infrastruktur** di antaranya dimiliki oleh Kementerian PUPR/BBWS Serayu Opak untuk breakwater, DKP DI Yogyakarta, dan DKP Kab. Kulonprogo;
2. Untuk menyelesaikan permasalahan pendangkalan dan rehab sarana dan prarana pelabuhan estimasi biaya mencapai **Rp 183 miliar**;
3. Lebih lanjut, diperoleh informasi dari Pemda Provinsi bahwa rencana pengembangan PP. Tanjung Adikerto berada di bawah koordinasi Kemenko Marines melalui **Tim TP5D – DIY** (Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas Daerah – DIY);
4. Apabila pengelolaan PP Tanjung Adikerto ke depannya sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemda DIY, maka KKP akan siap mendukung melalui penyiapan kebijakan dan regulasi.



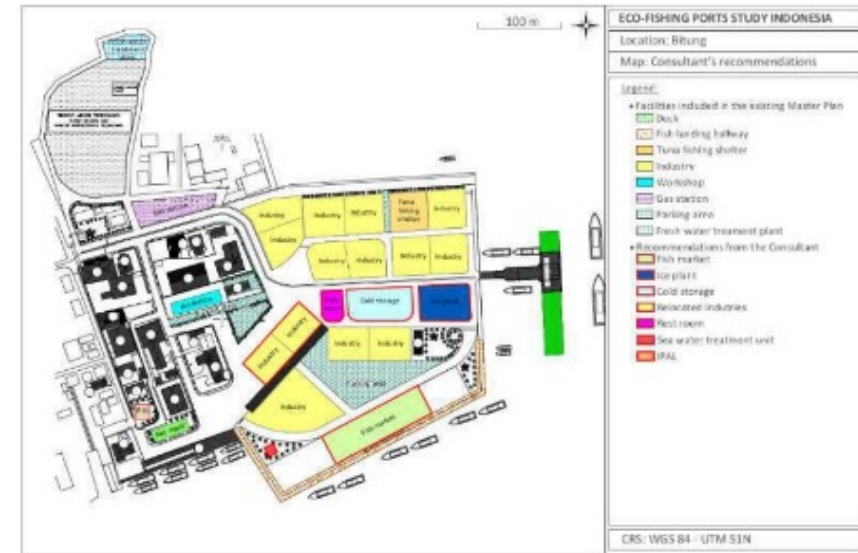
# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (10-14 April 2021)

## REKOMENDASI

Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk meningkatkan alokasi anggaran di PPS Bitung agar segala permasalahan yang ada dapat segera diatasi, seperti untuk kegiatan reklamasi tambatan kapal atau pembebasan lahan untuk perluasan pelabuhan kelautan perikanan, peningkatan sarana dan prasana infrastruktur, serta pendidikan dan pelatihan SDM bagi pegawai dalam rangka peningkatan jasa pelayanan dan nelayan dalam rangka adaptasi alih teknologi kapal, mengingat Kota Bitung merupakan wilayah penghasil perikanan yang telah membuktikan dapat meningkatkan PNBPN dan kesejahteraan nelayan.

## TINDAK LANJUT

- PPS Bitung direncanakan akan dilakukan pengembangan melalui Proyek PHLN Pengembangan Pelabuhan di Lingkar Luar Berwawasan Lingkungan (*Eco Fishing Port*) dengan tujuan sebagai **percontohan pelabuhan perikanan berstandar internasional dan berwawasan lingkungan** (*green port*).
- Kegiatan pengembangan PPS Bitung saat ini masih dalam tahap persiapan LA (*Letter of Agreement*) dengan pihak donor (*lender*) dari AFD Prancis.
- Sejalan dengan itu PPS Bitung juga merupakan salah satu titik Pelabuhan perikanan mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Zona Industri.



### Konsep Pengembangan PPS Bitung Melalui PHLN AFD Prancis

- Secara umum kegiatan pengembangan berupa perluasan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan serta pengembangan kapasitas SDM pengelola dalam rangka mewujudkan pelabuhan perikanan berstandar internasional dan berwawasan lingkungan.
- BRSDMKP melalui Puslatluh siap untuk melaksanakan Pelatihan bagi SDM PPS Bitung dalam rangka peningkatan jasa pelayanan dan nelayan untuk meningkatkan PNBPN dan kesejahteraan nelayan.



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Pelabuhan Perikanan Untia (14-18 Oktober 2021)

## REKOMENDASI

Komisi IV DPR RI meminta KKP agar segera memperbaiki tata kelola Pelabuhan Perikanan Untia dan segera mengusulkan pembentukan struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Untia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sehingga Pelabuhan Perikanan Untia dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu memberikan dampak ekonomi kepada Masyarakat Sulawesi Selatan.



## TINDAK LANJUT

- KKP telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah termasuk penyusunan naskah akademik agar struktur organisasi PP Untia dapat segera ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan UPT Pusat.
- Saat ini KKP Bersama KemenPAN RB sedang intensif membahas langkah-langkah penataan organisasi, termasuk perubahan nomenklatur beberapa unit kerja lingkup KKP serta penataan UPT lingkup KKP.
- Dukungan untuk penetapan PP Untia sebagai UPT Pusat juga telah diberikan Walikota Makasar sejak 2017 melalui Surat Rekomendasi Nomor 060/43/Ortala/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.





# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

## Stasiun PSDKP – KALTIM (17-21 Desember 2021)

### REKOMENDASI

- Komisi IV DPR RI mendorong KKP c.q. Ditjen PSDKP mendapat dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, mengingat jangkaun wilayah kerja dan tugasnya sangat berat melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.
- Komisi IV DPR RI mendorong KKP c.q. Ditjen PSDKP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Walikota) dalam rangka memohon hibah tanah untuk membangun Pangkalan PSDKP yang lebih besar.
- Komisi IV DPR RI mendukung penguatan kelembagaan pengawasan Satwas PSDKP Balikpapan KKP menjadi Pangkalan PSDKP setingkat eselon III dalam rangka penguatan dan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
- Komisi IV DPR RI mendorong KKP dapat memberikan fasilitas pelatihan SDM dan alokasi bantuan kapal penangkap ikan kepada kelompok/koperasi di Balikpapan ataupun di Panajam Paser Utara.

### TINDAK LANJUT

- Ditjen PSDKP telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta hibah lahan yang akan digunakan bagi pengembangan kelembagaan pengawasan SDKP
- Pengadaan bantuan kapal perikanan berukuran 5 GT bagi nelayan melalui APBN KKP TA 2022 dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) dengan Satker pelaksana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dalam proses perencanaan anggaran tahun 2022, Provinsi Kaltim direncanakan menerima alokasi anggaran, namun Dinas provinsi menyatakan ketidakmampuan untuk melaksanakan program tersebut.
- BRSDMKP melalui Puslatluh siap untuk memberikan pelatihan SDM kepada kelompok/koperasi di Balikpapan ataupun di Panajam Paser Utara.





# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

## Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (19-23 Februari 2022)

### REKOMENDASI

Komisi IV DPR RI akan mengundang stakeholder terkait melalui rapat gabungan, yakni KKP, PT Perindo, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas untuk mencari solusi dan menjawab berbagai permasalahan yang ada di PPS Belawan, seperti adanya dualisme tata kelola, Kuota BBM subsidi yang masih kurang, retribusi atau PNBP, dan pembentukan kelembagaan melalui BLU. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi untuk mampu menjadi fasilitator dan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga dalam rangka tercapainya kesejahteraan nelayan

### TINDAK LANJUT

- PPS Belawan direncanakan akan dilakukan pengembangan melalui Proyek PHLN Pengembangan Pelabuhan di Lingkar Luar Berwawasan Lingkungan (*EcoFishing Port*) dengan tujuan sebagai percontohan **pelabuhan Perikanan berstandar internasional dan berwawasan lingkungan** (*green port*).
- Sejalan dengan itu PPS Belawan juga merupakan salah satu titik pelabuhan perikanan mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Zona Industri.
- Lebih lanjut, dari pengembangan PPS Belawan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan PNBP pelabuhan dan juga dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi wilayah setempat.



### Rencana pengembangan PPS Belawan Melalui PHLN AFD Prancis

- Kegiatan pengembangan PPS Belawan saat ini masih dalam tahap persiapan *Letter of Agreement* dengan pihak donor (*lender*) dari AFD Prancis.
- Secara umum kegiatan pengembangan berupa **pengadaan lahan pelabuhan melalui kegiatan reklamasi** (mengingat sebagian besar lahan di PPS Belawan saat ini merupakan aset BUMN/ Perum Perindo) serta pengembangan fasilitas berskala internasional.



# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Politeknik KP Sidoarjo dan Balai Karantina Perikanan (15-19 Februari 2021)

## REKOMENDASI

- Komisi IV DPR RI mendukung hasil riset kegiatan taruan-taruni di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang telah menciptakan berbagai produk yang produktif dan kreatif dengan bahan baku yang lebih sederhana dan murah, seperti kincir air hemat energi “model stick 1 phase”, bioflok dengan teknologi creator microbubble, thermoelectric coolbox, Kristalida, Sukmarula, lemari pengasap ikan berbahan bakar bricket, autofeeder, bandeng cabut duri dan olahan lain, serta hasil diversifikasi ikan berupa ekado, kripik kulit ikan patin, nugget ikan bakso ikan, mietimi, hingga sirup mangrove.
- Komisi IV DPR RI mendorong produk hasil karya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dapat diproduksi secara masal dan dijadikan sebagai program bantuan pemerintah APBN-P 2021 atau pada tahun 2022 dalam rangka untuk kemaslahatan dan penyaluran ke masyarakat secara luas terutama melalui wakil rakyat di dapil masing-masing.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rekrutmen peserta didiknya dapat mengakomodir sebanyak 75% yang berasal dari Jawa Timur guna mencetak SDM yang kompeten dari generasi muda dan wirausahawan handal.

## TINDAK LANJUT

- Dengan telah ditetapkannya Politeknik KP Sidoarjo sebagai satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan **Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum** maka hasil karya Politeknik KP Sidoarjo akan dioptimalkan produksi dan pemasarannya melalui mekanisme BLU.
- Data eksisting peserta didik Politeknik KP Sidoarjo saat sebanyak 470 orang dengan rincian **410 orang (87%) berasal dari provinsi Jawa Timur** dan 60 orang (13%) dari luar provinsi Jawa Timur.

# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Balai Besar Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Perikanan Kota Makassar  
(19-23 Februari 2022)

## REKOMENDASI

Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas capaian yang telah diraih dan meminta Balai Besar KIPM Makassar agar mempertahankan prestasinya serta terus mendorong peningkatan nilai ekspor produk perikanan sulawesi selatan melalui pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat mulai dari penanganan hasil perikanan hingga ekspor.

## TINDAK LANJUT

BKIPM Makassar siap untuk melaksanakan **pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan** antara lain :

- Pendampingan dalam rangka sertifikasi cara penanganan ikan yang baik pada supplier
- Pendampingan dalam rangka sertifikasi HACCP dengan target 390 ruang lingkup produk
- Pendampingan dalam rangka penerapan biosecurity pada unit usaha perikanan dengan target 50 UUPI
- Pendampingan konsistensi penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada 121 UPI
- Sosialisasi ketentuan sistim jaminan mutu dalam rangka ekspor hasil perikanan





# TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR-RI

Stasiun Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru (7-11 Maret 2022)

## REKOMENDASI

- Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mendukung kinerja UPT Balai Karantina Ikan di Provinsi Riau untuk meningkatkan status UPT SKIPM yang semula setingkat eselon 4 menjadi setingkat eselon 2 atau Balai Besar.
- Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk meningkatkan pagu anggaran KKP minimal Rp.15 Trilyun

## TINDAK LANJUT

- Salah satu program kerja BKIPM terkait kelembagaan adalah peningkatan semua status eselonaring Satker UPT BKIPM yang berada pada wilayah Propinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan dan mutu hasil perikanan
- BKIPM akan meningkatkan semua status kelembagaan/Eselon Satker UPT BKIPM yang berada pada wilayah Propinsi, dan akan dibahas dengan Kementerian PAN danRB
- Salah satu kendala dalam pelaksanaan tusi BKIPM dalam melakukan sertifikasi kesehatan dan mutu hasil perikanan adalah terbatasnya alat dan bahan laboratorium, sehingga belum semua produk hasil perikanan dilakukan pengawasan dan pengujian laboratorium. Berkaitan dengan hal tersebut, KKP telah mengusulkan alokasi anggaran untuk penguatan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu melalui usulan alokasi belanja tambahan (ABT) maupun usulan pagu indikatif TA 2023.

# 3

## *Program Prioritas KKP Tahun 2023*



# USULAN DUKUNGAN KKP DALAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

TEMA RKP TAHUN 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

USULAN  
TOTAL PAGU  
INDIKATIF  
Rp 15 T

Mengembangkan Wilayah untuk  
Mengurangi Kesenjangan dan  
Menjamin Pemerataan

PN 2



Rp70 M

Revolusi Mental dan  
Pembangunan Kebudayaan

PN 4



Rp14 M

Memperkuat Stabilitas  
Polhukhankam dan Transformasi  
Pelayanan Publik

PN 7



Rp1.222 M

Operasional  
Rp2.910 M

Non PN  
Rp1.592 M



Rp8.314 M

PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi  
untuk Pertumbuhan Berkualitas  
dan Berkeadilan



Rp655,5 M

PN 3

Meningkatkan Sumber Daya  
Manusia Berkualitas dan  
Berdaya Saing



Rp221,5 M

PN 6

Mengembangkan Lingkungan  
Hidup, Meningkatkan Ketahanan  
Bencana dan Perubahan Iklim

PN = Prioritas Nasional

# USULAN PAGU INDIKATIF KKP TAHUN 2023

(Berdasarkan Unit Eselon I dan Jenis Belanja)

NO	UNIT ESELON I	USULAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2023 (RP. 000)							
		BELANJA OPERASIONAL			BELANJA NON OPERASIONAL			JUMLAH	%
		BELANJA PEGAWAI (001)	BELANJA OPS. PERKANTORAN (002)	SUBJUMLAH	PRIORITAS NASIONAL	NON PRIORITAS NASIONAL	SUBJUMLAH		
1	SETJEN	87.366.530	155.534.185	242.900.715	60.000.000	287.099.285	347.099.285	<b>590.000.000</b>	<b>3,93%</b>
2	ITJEN	34.783.969	5.527.348	40.311.317	-	46.688.683	46.688.683	<b>87.000.000</b>	<b>0,58%</b>
3	DITJEN PT	195.000.000	150.000.000	345.000.000	2.963.500.000	263.500.000	3.227.000.000	<b>3.572.000.000</b>	<b>23,81%</b>
4	DITJEN PB	190.000.000	86.000.000	276.000.000	3.694.850.000	234.150.000	3.929.000.000	<b>4.205.000.000</b>	<b>28,03%</b>
5	DITJEN PSDKP	182.554.655	65.709.076	248.263.731	1.265.000.000	156.736.269	1.421.736.269	<b>1.670.000.000</b>	<b>11,13%</b>
6	DITJEN PDS	62.500.000	29.000.000	91.500.000	499.570.000	162.930.000	662.500.000	<b>754.000.000</b>	<b>5,03%</b>
7	DITJEN PRL	106.000.000	36.000.000	142.000.000	489.645.000	103.355.000	593.000.000	<b>735.000.000</b>	<b>4,90%</b>
8	BPSDMKP	906.500.000	229.000.000	1.135.500.000	1.175.050.000	221.450.000	1.396.500.000	<b>2.532.000.000</b>	<b>16,88%</b>
9	BKIPM	272.500.000	117.000.000	389.500.000	349.247.209	116.252.791	465.500.000	<b>855.000.000</b>	<b>5,70%</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>2.037.205.154</b>	<b>873.770.609</b>	<b>2.910.975.763</b>	<b>10.496.862.209</b>	<b>1.592.162.028</b>	<b>12.089.024.237</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>%</b>		<b>13,58%</b>	<b>5,83%</b>	<b>19,41%</b>	<b>69,98%</b>	<b>10,61%</b>	<b>80,59%</b>	<b>100,00%</b>	

# USULAN RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2023

## Perikanan Tangkap



### Implementasi Penangkapan Ikan Terukur di 11 WPP berbasis kuota dengan sinergi kegiatan:

11 WPP	Penyusunan alokasi SDI, alokasi usaha dan kuota
11 WPP	Sistem data dan informasi Penangkapan Ikan Terukur serta pelayanan perizinan
90 PP	Pengembangan/rehabilitasi pelabuhan perikanan ( <i>major project</i> RPJMN)

### Pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan:

250 lokasi	Sarpras Kalaju
20.000 unit	Bantuan Alat Penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan
10.000 unit	Bantuan sarana penangkapan ikan (mesin kapal perikanan)
250.000 orang	Bantuan Premi Asuransi Nelayan
250 lokasi	Bakti Nelayan termasuk bantuan perbekalan melaut, diversifikasi dan pengembangan usaha nelayan
10 korporasi	Pengembangan Korporasi Nelayan ( <i>major project</i> RPJMN)

## Perikanan Budidaya



### Pengembangan Perikanan Budidaya untuk Peningkatan Ekspor UDANG

65 Kluster	Pembangunan Tambak Udang/ Bandeng Berbasis Kawasan ( <i>major project</i> RPJMN)
50 Unit	Pembangunan Hatchery Skala Kecil
200 Unit	Pengelolaan Irigasi Perikanan Partisipatif (PITAP)
9.000 Unit	Kincir
250 Unit	Excavator
125 Juta Ekor	Bantuan Benih Udang
360 Ribu Ekor	Calon Induk Udang
7.500 Orang	Bantuan Premi Asuransi Usaha
30.000 Orang	Bantuan Premi Asuransi Jiwa
7.500 Bidang	Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah

### LOBSTER

6 Lokasi	Budidaya Lobster Terintegrasi
750 Unit	KJA HDPE

### KEPITING

4 Lokasi	Budidaya Kepiting Terintegrasi
----------	--------------------------------

### RUMPUT LAUT

1.000 Unit	Kebun Bibit Rumput Laut
1.000 Ton	Bibit Rumput Laut
10 Unit	Unit Produksi Bibit RL Kultur Jaringan

## Perikanan Budidaya



### Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Berbasis Kearifan Lokal

150 Lokasi	Kampung Perikanan Budidaya
125 Juta Ekor	Bantuan Benih
840 Ribu Ekor	Calon Induk
7.500 Orang	Bantuan Premi Asuransi Usaha
45.000 Orang	Bantuan Premi Asuransi Jiwa
7.500 Bidang	Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah
760 Unit	Bioflok
400 Unit	Mesin dan Bahan Baku Pakan
150 Unit	Pembangunan Unit Pembenihan skala rakyat
10 Unit	Sarpras Budidaya Komoditas Lokal
750 Unit	KJA HDPE
500 Unit	Sarpras Ikan Hias
10 Lokasi	Pengembangan Korporasi Pembudidaya ( <i>major project</i> RPJMN)
220 Lokasi	Bimtek dan Sosialisasi Kebijakan
15 Lokasi	Pendukung Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

# USULAN RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2023

## Penguatan Daya Saing



### Peningkatan konsumsi ikan:

**130 Promosi** Kampanye Gemarikan di 34 provinsi (termasuk di kabupaten stunting dan kemiskinan ekstrem)

**10 Unit** Pembangunan Sentra Kuliner / Pasar Ikan

### Pembangunan sistem rantai dingin:

**10.000 Unit** *Coolbox*

**600 Unit** *Chest Freezer*

**6 Unit** Pabrik Es

**25 Unit** Gudang Beku/Gudang Beku *Portable*

**30 Unit** Mobil Refrigerasi (Berpendingin)

**10 Unit** Unit Pengolahan Ikan/UPI

### Pengembangan Usaha dan Investasi:

**10.000 Sertifikat** Sertifikat GMP bagi UPI

**400 UMKM** Penumbuhan Wirausaha

**5.000 UMKM** Fasilitasi Kemitraan & Akses Pembiayaan

**70 UMKM** Inkubator Bisnis dan Start Up Milenial

**8.000 Orang** Bimtek pengolahan dan kewirausahaan

**850 Unit** Sarana Pasca Panen, Pengolahan dan pengemasan produk

### Promosi dan Pameran Produk Skala Internasional:

**6 Promosi** Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional

## Pengelolaan Ruang Laut



### Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil

**15,8 juta Ha** Pengelolaan kawasan konservasi

**18 jenis** Konservasi jenis ikan

**32 kelompok** Bantuan KOMPAK

**18 kawasan** Sarpras Wisata Bahari & BMKT

**10 lokasi** Dermaga apung

**40 lokasi** Bantuan Ekonomi Produktif di PPK

**24 komunitas** Pemberdayaan masyarakat hukum adat, tradisional & lokal

### Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**500 Ha** Rehabilitasi mangrove

**18 Lokasi** Mitigasi & adaptasi perubahan iklim

**2 unit** Sarana produksi biofarmaka laut

**34 provinsi** Bulan Cinta Laut & penanganan sampah laut

**10 lokasi** Pembangunan Pusat Restorasi & Pengembangan Ekosistem Pesisir

### Pengelolaan Garam Rakyat

**300 ha** PUGaR

**50 unit** Revitalisasi GGR

**2 unit** Mini Washing plant (7.500 ton/thn)

**1 unit** Learning Business Center

**2 unit** GGN kapasitas 2.000 ton

### Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

**30 Rekomendasi** Perizinan PKKPR

**30 RZ** Rencana zonasi

## Pengawasan SDKP



### Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur:

**150 Hari** Operasional kapal pengawas

**300 Hari** Airborne surveillance

**11 WPP** Operasional Pusat Pengendalian

**75 Hari** Operasional Speed boat pengawas

**5.400 Kapal** Operasional pengawasan ketaatan kapal perikanan (before fishing dan post landing)

**6 Unit** Pembangunan kapal pengawas

**4 Unit** Pembangunan speed boat pengawas

**30 Unit** Pembangunan prasarana pengawasan Operasional dan pembinaan POKMASWAS (termasuk sosialisasi dan bimtek)

### Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya

**100 Pelaku Usaha** Operasional pengawasan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan

### Pengawasan Kelautan dan Pemanfaatan Ruang Laut

**50 Pelaku Usaha** Operasional pengawasan pengelolaan kawasan konservasi

**500 Pelaku Usaha** Operasional pengawasan destructive fishing

**30 Pelaku Usaha** Operasional pengawasan pemanfaatan ruang laut

# USULAN RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2023



## BRSDM KP



### Pelatihan Usaha bagi Masyarakat KP

70.000 Orang	Pelatihan usaha bagi masyarakat KP
8.500 Orang	Sertifikasi Kompetensi Masyarakat KP
30 Produk	Penerapan inovasi pelatihan

### Penyuluhan bagi Kelompok Usaha KP

49.000 Kelompok Masy	Penyuluhan pada kelompok usaha KP
5.527 Penyuluh	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP)

### Pendidikan Vokasi bagi Masyarakat KP

10 Politeknik	Integrasi menjadi Institut KP Indonesia
8.950 Taruna/Siswa	Pendidikan Vokasi pada Politeknik dan SUPM
36 Paket	Pengabdian masyarakat

### Inkubasi Usaha KP

36 Produk	Teknologi layak adopsi bagi usaha KP
50 Orang	Pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM usaha rintisan
5 Paket	Percontohan penerapan teknologi ( <i>Smart Fisheries Village</i> )

## Karantina Ikan, Pengendalian Mutu



### Penerapan Sistem Jaminan Mutu

120 Lokasi	Penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik
3.000 Produk	Sertifikasi HACCP
1.030 UPI	Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada UPI
300 UPI	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan <i>traceability</i>
47 Unit Kerja	Sarpras pengujian mutu dan Penerapan standar sistem manajemen mutu
800 Unit	Pemenuhan jaminan mutu dan biosecurity

### Pengembangan Karantina Ikan

250.000 Sertifikat	Pengawasan dan layanan sertifikasi ekspor, impor dan domestik
80 Perkara	Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan ikan
8 Lokasi	Sarpras pengawasan karantina ikan
41 Lokasi	Pengawasan di wilayah perbatasan

### Pengembangan Laboratorium Reference dan Akreditasi

35 Parameter	Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji
1 Lab	Standar/metode uji yang dihasilkan dan operasional laboratorium acuan



## Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari I Jl. Medan Merdeka Timur No. 16  
Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3519070 Ext. 7409  
Fax: (021) 3520337

[www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)